

Inilah perbelatan akbar para ulama PERSIS yang tergabung dalam Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam Ke-12. Sidang yang dilaksanakan di Ciganitri Bandung selama tiga hari (25-27 Muharram 1416 H/24-26 Juni 1995 M.) ini memang berlangsung hangat dan seru. Sebab, Asatidz dari berbagai jibab Persatuan Islam (dari Jakarta sampai Bangil) yang disaksikan banyak aktivis PC dan PD PERSIS dari berbagai pelosok daerah ke-PERSIS-an itu sempat pula menimbulkan diskusi (*munaqasyah*) yang mengarah pada perdebatan (*mujadalah*). Berikut RISALAH menyajikannya untuk anda.

"Sidang ini merupakan acara penyerta menyongsong Mukhtamar XI PERSIS di Jakarta September mendatang" demikian diantara kalimat Ustadz Drs. H. Shiddiq Amien yang menjadi pembawa acara pada pembukaan Sidang Dewan Hisbah tersebut. Ustadz yang Pimpinan Pesantren Persatuan Islam Benda Tasikmalaya ini menjelaskan bahwa ummat selalu menunggu keputusan-keputusan Dewan Hisbah, terutama bila dikaitkan dengan tantangan kemodernan (*modernitas*) yang diwarnai dengan globalisasi informasi. Maka, menurut Kyai muda yang dalam Dewan Hisbah menjabat sebagai Sekretaris, Dewan Hisbah biasa mengundang pakar yang ahli dalam masalah-masalah kontemporer yang akan dibahas pada kajian permasalahan di Sidang Dewan Hisbah ini.

Kali ini yang diundang berbicara adalah H. Moh. Syafii Antonio, MSc. dan Drs. H. Arif Thamrin (keduanya menerangkan tentang Takaful), Dr. Hj. Siti Suparti Wihardja (menerangkan tentang hal-hal air kencing), dan Dr. Zubairi Djoerban (yang menerangkan tentang AIDS dan penatalaksanaan pasien AIDS). Ustadz Shiddiq pun menerangkan juga bahwa selama ini, Dewan Hisbah pun telah banyak diteliti oleh para peneliti dan

pendekniawan.

Kemudian, KHE. Sar'an, Ketua Dewan Hisbah, menerangkan bahwa sidang kali ini dihadiri oleh para aktivis PERSIS Cabang dan Daerah. Menurutnya, sidang yang dilakukan, lebih terbuka jika dibanding sidang-sidang Dewan Hisbah sebelumnya, karena biasanya sidang diikuti oleh hanya anggota Dewan Hisbah saja. Namun dalam hal kewenangan, para peserta yang bukan anggota Dewan Hisbah hanya dibolehkan (jika ada) untuk memberikan saran-saran atau *advis* kepada anggota Dewan Hisbah saja, tidak langsung ke Sidang Dewan Hisbah.

Kepada para peserta, KHE. Sar'an pun menjelaskan bahwa dulu Dewan Hisbah ini bernama Majelis Ulama yang kedudukannya lebih tinggi dari Pusat Pimpinan Persatuan Islam. Namun, sejak ada referendum dari KHE. Abdurrahman, namanya menjadi Dewan Hisbah yang dipilih dan diangkat oleh Pusat Pimpinan PERSIS. Selain itu, tidak seperti Majelis Ulama yang aktif mencari masalah, Dewan Hisbah justru mendengar permasalahan yang mengandung *ijtihadiah* dari Pusat Pimpinan. Dan, menurut KHA. Latief Mukhtar, MA., Dewan Hisbah ini menjadi semacam lembaga konsultasi hukum pada PP PERSIS. Dan, segenap upaya penyebaran hasil Sidang Dewan Hisbah ini memang diserahkan wewenangnya pada PP PERSIS.

Selanjutnya, KHE. Sar'an menjelaskan pula bahwa di dalam Dewan Hisbah, selain ada Ketua (KHE. Sar'an sendiri), Wakil Ketua (KH. Akhyar Syuhada), dan Sekretaris (Drs. H. Shiddiq Amien), dan anggota; ada pula pembidangan garapan yaitu adanya Ketua Bidang Ibadah Ma'dhalah (KH. Usman Shalehuddin), Ketua Bidang Muamalah (KH. Maksum Nawawi), dan Ketua Bidang Aliran Sesat (KHA. Latief Mukhtar, MA.). Akhirnya, KHE. Sar'an menyebutkan bahwa tidak tertutup kemungkinan dalam keputusan

Dewan Hisbah ada perubahan manakala ditemukan dalil dan argumentasi yang lebih kuat.

Bagi KHA. Latief Mukhtar, MA. para ulama PERSIS ini memang mempunyai tugas yang cukup berat. Mereka harus menjadi ustadz di pesantren dan masyarakat, aktivis organisasi, dan harus siap pula menghadapi era globalisasi informasi dengan segala macam dinamikanya. Sementara itu, PERSIS selalu menunggu pendapatnya, terutama tentang hukum. Maka, bagi para ulama PERSIS adalah satu kewajiban untuk berijtihad terus menerus. Disinilah kemudian —demikian Ketua Umum PP PERSIS— perlu pula adanya regenerasi ulama. Karena banyak diantara ulama anggota Dewan Hisbah yang sudah cukup tua, KHE. Sar'an, contohnya.

Tentang permasalahan yang dikaji di Dewan Hisbah, Ustadz Latief mengatakan bahwa hal itu memang mengikuti arus informasi dan perkembangan masyarakat. Sehingga perlu adanya fatwa ulama terhadap masalah-masalah yang dihadapi ummat yang selalu tertantang oleh zaman. Kemudian, di samping itu, Dewan ini pun bertanggung jawab moral pula untuk menjawab isu-isu dari ulama lain yang seringkali menimbulkan kontroversi seperti pernyataan Prof. Dr. KH. Ibrahim Hosen bahwa *Al-Hadyu* (binatang sembelihan) itu bisa diganti dengan *Al-Qimah* (nilai/uang).

Pendapat Pakar

Setelah acara pembukaan, maka dilangsungkanlah acara dengar pendapat dari para pakar. Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa diadakannya mereka dimaksudkan untuk lebih memahami permasalahan yang sesungguhnya pada tataran *realita* (kenyataan) keilmuan, sehingga dalam praktek pengambilan hukum tidak ada kesalahan karena adanya prasangka (dari para ulama agamawan) yang tidak jelas pada permasalahan yang dibahas

(sebagai bagian dari dunia ilmiah).

Berikut ringkasan pendapat para pakar terhadap sebagian permasalahan yang akan dibahas dalam Sidang Dewan Hisbah. Pendapat di sini adalah pendapat pakar atas permintaan Dewan Hisbah sekaligus juga pendapat pakar tersebut atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan anggota Dewan Hisbah.

Permasalahan pertama yang dipresentasikan oleh pakar yang ahli di bidangnya adalah masalah Takaful. Menurut H. Moh. Syafi'i Antonio, MSc., konsep Asuransi Islam (Syarikat Takaful Indonesia) adalah konsep yang Islami, yakni lepas dari unsur-unsur: *riba*, *maisir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian). "Takaful" sendiri artinya saling menjamin atau saling menanggung. Sehingga, jika salah seorang peserta asuransi Takaful meninggal atau mendapat musibah lainnya, maka peserta yang lainnya harus membantunya demikian juga sebaliknya. Kemudian, dalam menempatkan investasi dananya, Asuransi Takaful menginvestasikan pada bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, seperti yang mempunyai sistem *mudharabah* dan *murabahah*. Dalam hal ini adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Pembicara kedua tentang Asuransi Takaful, Drs. H. Arif Thamrin, lebih menekankan pada praktek operasional Asuransi Takaful yang berbeda secara prinsipil dan juga secara operasional dengan sistem asuransi yang ada (konvensional).

Tentang Asuransi Takaful

Kajian pertama pada sidang ini adalah permasalahan Takaful sebagai wujud asuransi Islami. Pembawa makalah dalam hal ini adalah KHA. Latief Mukhtar, MA. Secara umum, Ustadz Latief tidak banyak berbeda secara prinsipil dengan para pakar dari Syarikat Takaful Indonesia yang telah lebih dulu memaparkan hal-hal tentang Takaful.

Ustadz Latief sendiri menyimpulkan bahwa tampaknya, ada dua konsep dasar yang dipakai dalam perusahaan asuransi Islam, yakni *al-Takaful* (konsep perlindungan) dan *al-Mudharabah* (konsep bagi hasil). Dengan demikian, Syarikat Takaful (Perusahaan Asuransi Islam) dapat dilukiskan sebagai syarikat perkongsian untung rugi antara syarikat dengan anggota-anggotanya yang mana kedua belah pihak bersepakat untuk saling menjamin dalam bentuk finansial atas kematian, kecelakaan, kebakaran, kehilangan, atau kerusakan harta benda yang mungkin menimpa salah seorang anggotanya. Oleh karena tidak mengandung unsur-unsur *gharar*, *maisir*, dan

riba, maka hukumnya halal.

Sebelum dibahas, KHE. Sar'an terlebih dulu mengumumkan kembali kepada para anggota Dewan Hisbah tentang Keputusan Dewan Hisbah tahun 1990 bahwa Asuransi yang mengandung unsur-unsur: *Gharar*, *Riba*, *Maisir*, dan menyalahi kewarisan Islam hukumnya haram; serta asuransi yang bersifat *ta'awun* yang tidak mengandung unsur-unsur tersebut di atas adalah boleh atau *mubah*.

Diskusi belum lagi dimulai terhadap materi ketika ada tanggapan metodologis dari KHI. Sodikin dan KHA. Ghazaly bahwa pembahasan tentang Takaful ini menyerempet pada adanya pendalilan (*takalluf*) terhadap kemodernan yang berjalan.

Dalam menjawab tanggapan Ustadz Ikin dan Ustadz Ghazaly itu, KHA. Latief menjelaskan bahwa kata "mendalili" itu konotasinya negatif. Yakni, mendalili yang haram menjadi halal atau mendalili yang halal menjadi haram demi kepentingan tertentu. Padahal, pembahasan ini dimaksudkan untuk membahas konsep cendekiawan dan ulama Islam yang telah dilaksanakan di berbagai negara, termasuk di negara-negara non-Muslim, sebagai perwujudan bahwa ajaran Islam itu *rahmatan lil 'alamin*.

Dalam siyasah syar'iyah — demikian Ustadz Latief — ada yang disebut *Khiyal al-Syar'iyah* (Helahnya hukum untuk melepaskan diri dari yang haram). Dan *khiyal al-Syar'iyah* ini ada yang *mahmudah* (terpuji) dan ada yang *madzmumah* (tercela). Yang tercela inilah yang disebut *takalluf* (pendalilan). Sekarang ini, menurut Ustadz Latief, sudah berjalan di negeri kita ini sistem asuransi Barat yang tidak lepas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Mumpung baru berjalan sedikit (kurang-lebih 7 %) pemegang polis, apakah kita mau membiarkan yang haram itu dibiarkan, sementara kita belum mampu membuat konsep sendiri. Oleh karena itu, kita perlu mendukung usaha-usaha melepaskan unsur-unsur yang diharamkan itu.

Terhadap kesimpulan Ustadz Latief tersebut di atas memang ada pihak yang menyetujui, KH. Abdul Qadir Shadiq, contohnya. Ia berpandangan bahwa selama bersifat *ta'awun* dan tidak menjadikan *madlarat* (*Laa Dlaraara wa laa Dliraara*) maka asuransi ini *sah* dilaksanakan. Seperti Ustadz Abdul Qadir, KH. Abdurrahman KS. pun menyebutnya sebagai hal yang *sah* dilakukan asal betul-betul tidak ada *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Maka menurutnya, hukum asuransi ini *jaiz* (boleh) karena ini adalah masalah *mu'amalah*. Demikian juga halnya dengan KH. Nurdin. Menurutnya,

Takaful ini secara prinsipil dapat diterima walaupun jika masih ada kekurangan, kita mempunyai tanggung jawab moral untuk memperbaikinya.

Namun, selanjutnya, konsep ini tidak berjalan mulus diterima di meja Sidang. Tentang hal ini KHI. Shadiqin mengkhawatirkan akan terjadi "orang yang berniat sedekah (peserta asuransi) memakan sedekahnya sendiri", jika orang yang merelakan uangnya untuk tujuan takaful atau *ta'awun* dalam arti sedekah mendapatkan musibah lebih dulu dari yang lain. Pernyataan Ustadz Ikin tersebut didukung oleh KH. Aceng Zakaria yang selanjutnya membacakan hadits-hadits tentang tidak halalnya mengambil kembali sedekah yang telah diberikan.

Selanjutnya, KH. Usman Sholehudin mempertanyakan kelebihan uang yang diberikan pada pemegang polis Takaful, apakah hal ini bukan *riba*?

Selain itu, Ustadz Aceng Zakaria pun menambahkan tentang masih adanya *gharar* pada Takaful ini. Ia melihat adanya ketentuan *tabarru* (derma) yang berjumlah 5 % sebagai syarat wajib yang ditentukan oleh pihak Syarikat Takaful. Bukankah *riba* itu haram disebabkan adanya prasyarat dari pihak tertentu (*'Inda syurutihim*)?, demikian Ustadz Aceng berargumentasi.

Ustadz Latief menjawab pernyataan Ustadz Aceng dengan analogi pada transaksi iuran sebuah organisasi, "Bukankah dalam berorganisasi pun ada uang derma tertentu yang wajib dibayar?". Selanjutnya, walaupun tidak murni bersifat *tabarru*, namun Ustadz Latief berpandangan bahwa Takaful ini dapat dijadikan aturan pengganti (*al-Nizhaamu al-Badiil*) dari asuransi konvensional. Agaknya kaidah *Maa laa yudraku kulluhu laa yutraku kulluhu* (Apa saja yang tidak dapat dilakukan secara keseluruhan jangan ditinggalkan semuanya) telah menjadi prinsip pandangannya dalam hal ini.

Diskusi alot — sehingga harus membuat team perumus yang harus berdebat lagi untuk merumuskan keputusan Dewan Hisbah di luar Sidang — tentang asuransi Takaful ini kemudian membuahkan Keputusan/Ketetapan Sidang Dewan Hisbah Ke-12 Tentang Asuransi Takaful: 1. Bahwa Asuransi Takaful bisa dijadikan sebagai "An-Nizhaamu al-badiil" dari sistem asuransi konvensional. 2. Bahwa Asuransi Takaful yang ada saat ini masih harus berusaha mengeliminir diri dari unsur-unsur: *Gharar*, *riba* dan *maisir*. QM. Taufiq RM